



**PROVINSI
JAWA TENGAH**

RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA)

TAHUN 2020-2024

BNN PROVINSI JAWA TENGAH

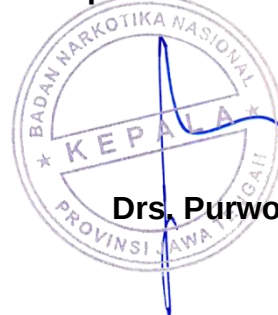
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ini telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renproja ini juga disajikan kebijakan dan strategi operasional serta perencanaan target capaian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun 2020-2024 yang meliputi target kinerja dan kerangka pendanaan.

Masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN Republik Indonesia untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Program Kerja (Renproja) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 ini diucapkan terima kasih.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah



Drs. Purwo Cahyoko, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Jawa Tengah diapit oleh dua Provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur serta satu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibatasi langsung dengan laut dimana sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudera Hindia. Hal ini disinyalir merupakan wilayah kerawanan peredaran gelap Narkoba.

Jumlah penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2018-2020 sebagai berikut :

a) Data Kasus Tindak Pidana Narkotika BNN Provinsi Jawa Tengah

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BNNP JAWA TENGAH

Thn	Kasus	Tsk	Barang Bukti					
			Shabu (gram)	Ganja (gram)	Ekstasi (butir)	Gorilla	THC	Kokain
2018	17	29	43.206,017	0,83	119	-	-	-
2019	11	38	6.376,95	5.943,68	-	-	-	-
2020	10	38	1.070,72	1.001,95	510	4,5	79 butir permen	-

Sumber: Bidang Pemberantasan BNNP Jateng

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA WILAYAH POLDA JAWA TENGAH

Thn	Kasus	Tsk	Barang Bukti					
			Shabu (gram)	Ganja (gram)	Ekstasi (butir)	Gorilla	THC	Kokain
2018	1636	2032	5.811,6	3.534	1.316	-	-	-
2019	1385	1717	16.832,7	31.539,7	577,8	-	-	-
2020	1765	2173	15.844	9.252,2	1.860,2	-	-	-

Sumber: DitRes Narkoba Polda Jateng

b) Data Penyalah Guna Narkoba Yang Lapor Diri Atau *Voluntary*

Dalam rangka penanganan rehabilitasi salah satu upayanya adalah memberikan keleluasan kepada penyalahguna narkoba dengan cara lapor diri atau *voluntary*.

DATA PENYALAHGUNA YANG LAPOR DIRI

TAHUN	JUMLAH LAHGUN VOLUNTARY YANG LAPOR DIRI	KETERANGAN
2018	340	- Berikut adalah data di Klinik milik BNNP, Klinik BNNK, dan lembaga mitra BNNP dan BNNK (IP maupun KM) - data lahgun yang mengakses layanan di lembaga rehabilitasi mitra BNNP dan BNNK tahun 2018 s.d 2019 berdasarkan jumlah klaim dari lembaga mitra ke BNNP/ BNNK - Untuk tahun 2020 jumlah lahgun yang mengakses layanan di lembaga rehabilitasi Komponen masyarakat tidak diinput karena tidak terpisahkan untuk klien <i>voluntary</i> dan <i>compulsary</i>
2019	582	
2020	379	

Sumber: Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah

c) Data Fasilitas Layanan Rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

Tempat layanan rehabilitasi merupakan fasilitas yang penting dalam menunjang kegiatan penanganan Narkoba. BNN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kerja sama dengan beberapa fasilitas sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

DATA FASILITAS LAYANAN REHABILITASI

TAHUN	FASILITAS LAYANAN REHABILITASI	
	LRKM	LRIP
2018	- RSU Gunung Sawo Temanggung	- RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
	- RS PKU Muhammadiyah Temanggung	- RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
	- Klinik Pratama Brastomolo	- RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
	- RSU Santa Maria Cilacap	- RSUD dr. Soedirman Kebumen
	- Klinik Karlina	- RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo
	- Klinik Pratama Aisiyah Siti Hajar	- RSUD dr. R. Soetijono Blora
	- RS Mitra Siaga	- Puskesmas Pejagoan Kebumen
	- RSU Islam Harapan Anda	- RSUD Kab. Temanggung
	- RSU Harapan Ibu Purbalingga	- RSUD Cilacap
	- Klinik Siloam Purbalingga	- RSUD Majenang
	- RSU Wiradadi Huasada	- Puskesmas Sukorejo 01
	- Klinik Limpung Medical Center	- RSUD Kardinah
	- Klinik Rawat Inap Baitul Ihsan	- Puskesmas Tegal Timur
	- RSI Kendal	- Puskesmas Tegal Barat
	- RSU Darul Istiqomah Kaliwungu	- RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
	- Klinik Surya Medika Boja	- Puskesmas Kalimanah
	- Yayasan L-Paska	- RSUD Ajibarang
		- Puskesmas I Baturraden
		- Puskesmas Bandar I
		- RSUD Batang

TAHUN	FASILITAS LAYANAN REHABILITASI	
	LRKM	LRIP
	17 Lembaga	20 Lembaga
2019	- Yayasan Sayap Sehat Pekalongan	- RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
	- Yayasan Sosial Peduli Surya Bakti Boyolali	- RSUD Dr. Soedirman Kebumen
	- Yayasan Rumah Pintar Al Ma'laa Pekalongan	- RSUD Dr. R. Soetijono Blora
	- RSUD Gunung Sawo Temanggung	- RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
	- RS PKU Muhammadiyah Temanggung	- RSUD KRT Setjonegoro Kab. Wonosobo
	- Klinik Pratama Brastomolo	- RSUD Soehadi Prijonegoro Sragen
	- Klinik PKU Muuhammadiyah Sampang	- Puskesmas Halmahera
	- Klinik Karlina	- Puskesmas Gunungpati
	- Klinik Pratama Aisiyah Siti Hajar	- Puskesmas Pejagoan Kebumen
	- RS Mitra Siaga	- Puskesmas Karanganyar Kebumen
	- RSUD Islam Harapan Anda	- RSUD Kab. Temanggung
	- RSUD Harapan Ibu Purbalingga	- RSUD Cilacap
	- Klinik Siloam Purbalingga	- RSUD Majenang
	- RSUD Siaga Medika Purbalingga	- RSUD Kardinah
	- RSUD Wiradadi Huasada	- Puskesmas Tegal Timur
	- Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Hikmah	- Puskesmas Tegal Barat
	- RSUD Siaga Medika	- RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
	- RS QIM	- Puskesmas Kalimanah
	- Klinik Limpung Medical Center	- RSUD Ajibarang
	- RSI Kendal	- Puskesmas I Baturraden
	- RSUD Darul Istiqomah Kaliwungu	- Puskesmas Bandar I
	- RS Aisiyah Muntlan	- RSUD Batang
	- Panti Rehabilitasi Betesda	- Puskesmas Sukorejo 01
	- Yayasan L-Paska	- RSUD Ngipang Kota Surakarta
		- Puskesmas Jayengan
		- Puskesmas Purwodiningratan
		- Puskesmas Gambirsari
		- Bapas Kota Surakarta
		- RSUD Muntlan
	24 lembaga	29 lembaga
2020	- RSI Kendal	- RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
	- RSUD Darul Istiqomah Kaliwungu	- RSUD Dr. Soedirman Kebumen
	- Klinik Limpung Medical Center	- RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
	- RSUD Siaga Medika Tegal	- Puskesmas Pejagoan Kebumen
	- RSI Harapan Anda Kota Tegal	- Puskesmas Karanganyar Kebumen
	- Klinik Pratama Aisiyah	- Puskesmas Bandar 1
	- RSUD Gunung Sawo Temanggung	- RSUD Batang
	- Klinik Pratama Brastomolo	- RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata
	- RS PKU Muhammadiyah	- Puskesmas Sukorejo 1 Kendal
	- RSUD Siaga Medika Purbalingga	- Puskesmas Batturaden I
	- RSUD Harapan Ibu Purbalingga	- RSUD Ajibarang
	- Klinik Siloam Purbalingga	- RSUD Kota Surakarta

TAHUN	FASILITAS LAYANAN REHABILITASI	
	LRKM	LRIP
	- RSUD Siaga Medika Banyumas	- RSUD Kardinah
	- RSUD Wiradadi Husada Banyumas	- Puskesmas Tegal Barat
	- Klinik Karlina Cilacap	- Puskesmas Tegal Timur
	- Klinik PKU Muhammadiyah Sampang	
	- Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan	
	- Panti Rehabilitasi Betesda	
	18 Lembaga	15 Lembaga

Sumber: Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah

d) Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak)

DATA FASILITAS IPWL

TAHUN	IPWL	LEMBAGA	STATUS KEMITRAAN DENGAN BNNP/ BNNK	KATEGORI	
				AKTIF	TIDAK
2018	Kemenkes	- RSUP dr. Kariadi	-	-	v
		- RSUD RA Kartini Jepara	-	v	
		- RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo	-	-	v
		- RSUD Kraton	-	-	v
		- RSUD Kab. Sukoharjo	-	-	v
		- RSUD dr. H. Soewondo Kendal	Mitra BNNK	v	
		- RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso	-	-	v
		- RSUD dr. Muwardi Solo	-	-	-
		- RSUD Banyumas	-	-	-
		- RSJD Surakarta	-	-	-
		- RSJD dr. RM. Soejarwadi	-	-	-
		- RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang	Mitra BNNP	v	-
		- RSJ Prof. dr. Soeroyo	-	v	-
		- RS. H. A. Djunaid	Mitra BNNK	-	-
		- RS Bhayangkara TK IV Akpol Semarang	-	-	-
		- RS Bhayangkara TK II Semarang	-	-	-
		- Puskesmas Sidorejo Lor	-	-	v
		- Puskesmas Poncol Semarang	Mitra BNNP	-	-
		- Puskesmas Parakan	Mitra BNNK	-	-
		- Puskesmas Manahan	-	-	-
		- Puskesmas Cilacap Selatan	-	-	-
		21 Lembaga			
	Kemensos	- Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra "Satria" Baturaden	-	v	-
		- Yayasan Rumah Damai	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami Purbalingga	-		-

TAHUN	IPWL	LEMBAGA	STATUS KEMITRAAN DENGAN BNNP/ BNNK	KATEGORI	
				AKTIF	TIDAK
		- Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Cinta Kasih Bangsa	Mitra BNNP	v	-
		- Maunatul Mubarak	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Sinai	-	v	-
		- Yayasan Mitra Alam	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Al Ma'laa Getas rejo	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid	-	-	-
		- Yayasan Lentera Bangsa Indonesia	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Salatiga	Mitra BNNP	v	-
		12 Lembaga			
2019	Kemenkes	- RSUP dr. Kariadi	-		v
		- RSUD RA Kartini Jepara	-	v	
		- RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo	-		v
		- RSUD Kraton	-		v
		- RSUD Kab. Sukoharjo	-		v
		- RSUD dr. H. Soewondo Kendal	Mitra BNNK	v	
		- RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso	-		v
		- RSUD dr. Muwardi Solo	-		
		- RSUD Banyumas	-		
		- RSJD Surakarta	-		
		- RSJD dr. RM. Soejarwadi	-		
		- RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang	Mitra BNNP	v	
		- RSJ Prof. dr. Soeroyo	-	v	
		- RS. H. A. Djunaid	Mitra BNNK		
		- RS Bhayangkara TK IV Akpol Semarang	-		
		- RS Bhayangkara TK II Semarang	-		
		- Puskesmas Sidorejo Lor	-		v
		- Puskesmas Poncol Semarang	Mitra BNNP		
		- Puskesmas Parakan	Mitra BNNK		
		- Puskesmas Manahan	-		
		- Puskesmas Cilacap Selatan	-		
		21 Lembaga			
	Kemensos	- Yayasan Rumah Damai	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Pendidikan Islami Nurul Ichsan Al Islami	Mitra BNNK		
		- Yayasan Rehabilitasi At Tauhid	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Cinta Kasih Bangsa	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Maunatul Mubarak	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Sinai	-		
		- Yayasan Mitra Alam	Mitra BNNK	v	

TAHUN	IPWL	LEMBAGA	STATUS KEMITRAAN DENGAN BNNP/ BNNK	KATEGORI	
				AKTIF	TIDAK
2020		- Yayasan Al Ma'laa Getas Rejo	Mitra BNNP	v	
		- Panti Asuhan Raden Sahid			
		- Yayasan Lentera Bangsa Indonesia	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta	Mitra BNNK	v	
		- Yayasan An Nur Purbalingga			
		- Yayasan Rumah Pintar Al Ma'laa Pekalongan	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Ayodya Mandiri	Mitra BNNP	v	
		- Yayasan Anargya	Mitra BNNP	v	
		15 Lembaga			
	Kemenkes	- RSUP dr. Kariadi	-	-	v
		- RSUD RA Kartini Jepara	Mitra BNNP	v	
		- RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo	-	-	v
		- RSUD Kraton	-	-	v
		- RSUD Kab. Sukoharjo	-	-	v
		- RSUD dr. H. Soewondo Kendal	Mitra BNNK	v	
		- RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso			v
		- RSUD dr. Muwardi Solo	Mitra BNNK		
		- RSUD Banyumas	-		
		- RSJD Surakarta	Mitra BNNK		
		- RSJD dr. RM. Soejarwadi	Mitra BNNP		
		- RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang	Mitra BNNP	v	
		- RSJ Prof. dr. Soeroyo	Mitra BNNP	v	
		- RS. H. A. Djunaid	Mitra BNNK		
		- RS Bhayangkara TK IV Akpol Semarang	-		
		- RS Bhayangkara TK II Semarang	Mitra BNNP	v	
		- Puskesmas Sidorejo Lor	-		v
		- Puskesmas Poncol Semarang	Mitra BNNP		
		- Puskesmas Parakan	Mitra BNNK		
		- Puskesmas Manahan	-		
		- Puskesmas Cilacap Selatan	-		
		21 Lembaga			
	Kemensos	- Yayasan Rumah Damai	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami	Mitra BNNK		-
		- Yayasan Rehabilitasi At Tauhid	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Maunatul Mubarak	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan L- Paska	Mitra BNNK	v	-
		- Yayasan Mitra Alam	Mitra BNNK	v	-

TAHUN	IPWL	LEMBAGA	STATUS KEMITRAAN DENGAN BNNP/ BNNK	KATEGORI	
				AKTIF	TIDAK
		- Yayasan Al Ma'laa Getas Rejo	Mitra BNNP	v	-
		- Panti Asuhan Raden Sahid	-	-	-
		- Yayasan Lentera Bangsa Indonesia	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa	Mitra BNNK	v	-
		- Yayasan An Nur Haji Supono	-	-	-
		- Yayasan Rumah Pintar Al Ma'laa Getasrejo Cab. Pekalongan	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Ayodya Mandiri	Mitra BNNP	v	-
		- Yayasan Anargya Sukoharjo	Mitra BNNK	v	-
		15 Lembaga			

Sumber: Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah

e) Data Penyalah Guna Narkoba Yang Telah Mendapat Layanan Rehabilitasi

DATA PENYALAHGUNA NARKOBA YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI

TAHUN	LAHGUN MENDAPAT LAYANAN REHAB	KETERANGAN
2018	340	- Data merupakan akumulasi dari jumlah lahgun yang mengakses layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNNP, BNNK dan lembaga mitra BNNP/ BNNK (IP maupun KM) - Data yang diinput tahun 2018 s.d 2019 hanya data yang melakukan klaim ke BNNP/ BNNK - Data 2020 merupakan data akumulasi lahgun yang mengakses ke layanan Klinik BNNP, BNNK dan lembaga komponen masyarakat
2019	582	
2020	1428	

Sumber: Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah

f) Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

DATA PENGHUNI LAPAS KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA

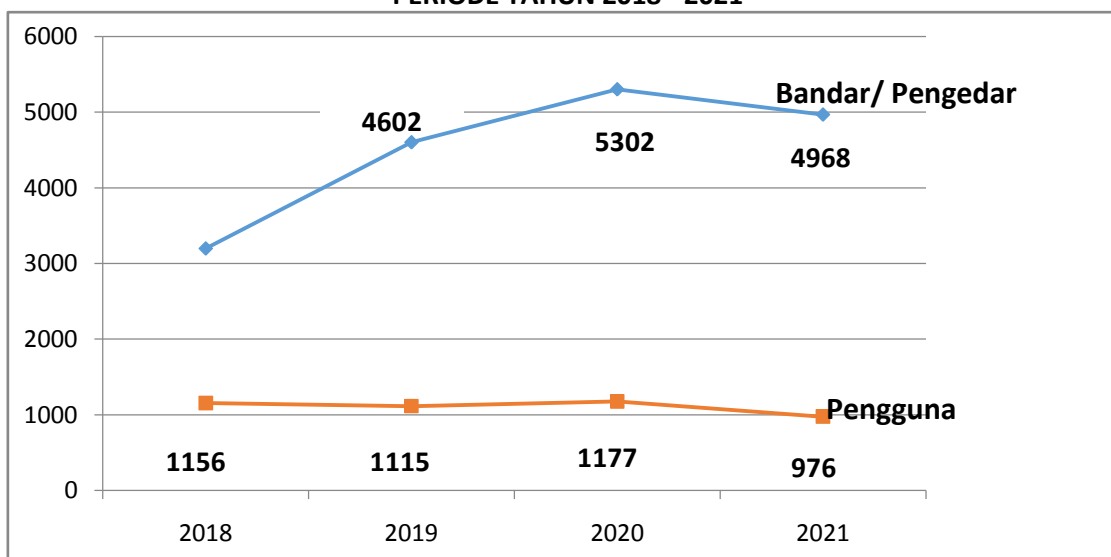
NO	TAHUN NAMA UPT	2018		2019		2020		2021	
		BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA
1	LAPAS KELAS I BATU HIGH RISK NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	46	0	65	0	61	1	31	0
2	LAPAS KELAS I SEMARANG	778	33	1142	9	1116	13	991	23
3	LAPAS KELAS II A AMBARAWA	0	214	0	246	234	0	207	31
4	LAPAS KELAS II A BESI NUSAKAMBANGAN	345	53	169	30	200	22	200	14
5	LAPAS KELAS II A KEMBANG KUNING NUSAKAMBANGAN	288	0	227	0	167	93	151	11
6	LAPAS KELAS II A KENDAL	0	49	56	0	79	2	82	16
7	LAPAS KELAS II A MAGELANG	100	76	12	155	225	98	218	102
8	LAPAS KELAS II A PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LAPAS KELAS II A PEKALONGAN	97	0	129	2	155	1	171	2
10	LAPAS KELAS II A PERMISAN NUSAKAMBANGAN	241	39	375	18	275	88	285	97
11	LAPAS KELAS II A PURWOKERTO	568	2	487	7	421	5	385	10
12	LAPAS KELAS II A SRAGEN	96	151	96	145	105	123	184	53
13	LAPAS KELAS II B BREBES	48	26	40	17	75	7	44	18
14	LAPAS KELAS II B CILACAP	0	50	0	53	0	66	5	58
15	LAPAS KELAS II B KLATEN	27	38	43	50	58	45	82	28
16	LAPAS KELAS II B PATI	46	70	52	106	66	90	90	58
17	LAPAS KELAS II B SLAWI	98	3	94	4	149	3	36	9
18	LAPAS KELAS II B TEGAL	82	3	130	8	126	18	135	22

NO	TAHUN NAMA UPT	2018		2019		2020		2021	
		BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA
19	LAPAS KHUSUS KELAS II A KARANGANYAR	0	0	0	0	275	0	232	18
20	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A NUSAKAMBANGAN	0	0	235	111	443	7	287	93
21	LAPAS NARKOTIKA KELAS II B PURWOKERTO	210	19	0	1	6	6	13	1
22	LAPAS PEMUDA KELAS II B PLANTUNGAN	0	1	157	27	0	0	0	0
23	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG	140	34	230	16	190	1	111	48
24	LAPAS TERBUKA KELAS II B KENDAL	0	5	0	0	0	0	0	0
25	LAPAS TERBUKA KELAS II B NUSAKAMBANGAN	13	12	0	5	0	0	0	0
26	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO	107	0	86	97	0	0	0	1
27	RUTAN KELAS I SURAKARTA	0	4	77	15	69	287	345	23
28	RUTAN KELAS II A PEKALONGAN	0	9	0	17	17	96	21	21
29	RUTAN KELAS II B BANJARNEGARA	78	0	0	22	0	8	7	2
30	RUTAN KELAS II B BANYUMAS	2	40	0	2	0	22	9	20
31	RUTAN KELAS II B BATANG	0	13	25	3	95	0	96	3
32	RUTAN KELAS II B BLORA	0	32	0	43	15	3	19	5
33	RUTAN KELAS II B BOYOLALI	55	1	0	31	0	54	33	37
34	RUTAN KELAS II B DEMAK	11	2	113	11	36	0	20	6
35	RUTAN KELAS II B JEPARA	0	0	5	7	160	6	161	3
36	RUTAN KELAS II B KEBUMEN	0	48	37	0	13	6	8	0

NO	TAHUN NAMA UPT	2018		2019		2020		2021	
		BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA	BANDAR/ PENGEDAR	PENGGUNA
37	RUTAN KELAS II B KUDUS	0	27	0	22	0	0	24	6
38	RUTAN KELAS II B PEMALANG	25	3	0	25	0	33	18	19
39	RUTAN KELAS II B PURBALINGGA	0	7	37	1	1	33	0	29
40	RUTAN KELAS II B PURWODADI	10	10	0	7	45	1	59	3
41	RUTAN KELAS II B PURWOREJO	0	39	7	13	38	6	19	16
42	RUTAN KELAS II B REMBANG	0	16	0	61	4	4	3	5
43	RUTAN KELAS II B SALATIGA	86	13	0	13	0	49	15	21
44	RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG	37	3	168	9	0	14	0	19
45	RUTAN KELAS II B WONOGIRI	34	5	32	2	168	11	155	21
46	RUTAN KELAS II B WONOSOBO	44	3	60	3	68	2	16	4
	JUMLAH	3198	1156	4602	1115	5302	1177	4968	976

Sumber: DivPas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah

DATA NARAPIDANA NARKOBA PERIODE TAHUN 2018 - 2021



Sumber: DivPas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah

g) Data Dan Informasi Kondisi Demografi Kewilayahan Dan Pendidikan

Secara geografis wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°4' dan 8°3' LS dan antara 108° 30' BT. Provinsi Jawa Tengah dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan DI Yogyakarta
- Sebelah Barat : Jawa Barat
- Sebelah Timur : Jawa Timur

Jawa Tengah adalah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 32.548 km² atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34.718.204 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 17.212.455 jiwa dan Perempuan sebanyak 17.505.749 jiwa.

Adapun jumlah tempat pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam tabel di bawah ini:

DATA JUMLAH TEMPAT PENDIDIKAN

SEKOLAH/ PT	JUMLAH	KETERANGAN
TK	14.138	Negeri dan swasta
SD	18.780	Negeri dan swasta
SMP	3.391	Negeri dan swasta
SMA	848	Negeri dan swasta
Perguruan Tinggi	272	Negeri dan swasta

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil Desember 2019

h) Data SDM BNN di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

DATA PEGAWAI						
BNNP JAWA TENGAH DAN BNN KAB/KOTA SE-JAWA TENGAH						
NO	SATKER	PNS	POLRI	PPNPN	CPNS	JUMLAH
1	BNNP JAWA TENGAH	58	9	28	2	97
2	BNNK PURBALINGGA	13	2	16	0	31
3	BNNK CILACAP	11	2	13	5	31
4	BNNK BATANG	13	0	16	1	30
5	BNNK KENDAL	15	1	15	0	31
6	BNNK TEGAL	10	0	16	1	27
7	BNNK TEMANGGUNG	15	1	12	1	29
8	BNNK BANYUMAS	19	1	15	0	35
9	BNNK MAGELANG	10	4	13	0	27
10	BNNK SURAKARTA	16	3	16	0	35
JUMLAH		180	23	160	10	373

Sumber: Bagian Umum BNNP Jawa Tengah

i) Data Sarana Prasarana Perkantoran

DATA STATUS KEPEMILIKAN GEDUNG KANTOR				
BNNP JAWA TENGAH DAN BNN KABUPATEN/KOTA JAJARAN				
No.	Satker	Status Tanah	Status Gedung	Keterangan
1	BNNP Jawa Tengah	Milik Sendiri	Milik Sendiri (Hibah)	Hibah
2	BNNK Tegal	Pinjam pakai	Pinjam Pakai	
3	BNNK Purbalingga	Pinjam Pakai	Milik BNN	
4	BNNK Batang	Pinjam Pakai	Milik BNN	
5	BNNK Banyumas	Pinjam Pakai	Pinjam Pakai	
6	BNNK Kendal	Pinjam Pakai	Milik BNN	
7	BNNK Cilacap	Pinjam Pakai	Milik BNN	
8	BNNK Temanggung	Pinjam Pakai	Pinjam Pakai	Terdapat hibah tanah
9	BNNK Surakarta	Pinjam Pakai	Pinjam Pakai	
10	BNNK Magelang	Pinjam Pakai	Pinjam Pakai	

Sumber: Bagian Umum BNNP Jawa Tengah

j) Sarana klinik BNNP dan BNNK.

Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah diberi nama Klinik Enggal Waras mempunyai fasilitas:

1. Dokter umum
2. Perawat
3. Sarana medis
4. Ruang tindakan
5. Ruang administrasi dan pendaftaran

k) Senjata api

Senjata api yang dimiliki oleh BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran berasal dari Biro Umum BNN sebagai berikut :

**DATA STATUS KEPEMILIKAN SENJATA API
BNNP JAWA TENGAH DAN BNN KABUPATEN/KOTA JAJARAN**

NO	SATKER	PISTOL	SENAPAN	KETERANGAN
1	BNNP Jawa Tengah	25	5	Amunisi Kal 22 LR HV : 4.798 butir Amunisi Kal 9 x19 mm : 1.523 butir Amunisi Kal 12 GA : 387 butir Amunisi Kal 5,56x45 mm : 1.680 butir Amunisi Kal 9x21 mm : 5.520 butir
2	BNNK Tegal	1	1	
3	BNNK Purbalingga	2	1	
4	BNNK Batang	1	1	
5	BNNK Banyumas	1	1	
6	BNNK Kendal	1	1	
7	BNNK Cilacap	3	1	
8	BNNK Temanggung	2	1	
9	BNNK Surakarta	3	1	
10	BNNK Magelang	1	1	
JUMLAH		40	14	

Sumber: Bagian Umum BNNP Jawa Tengah

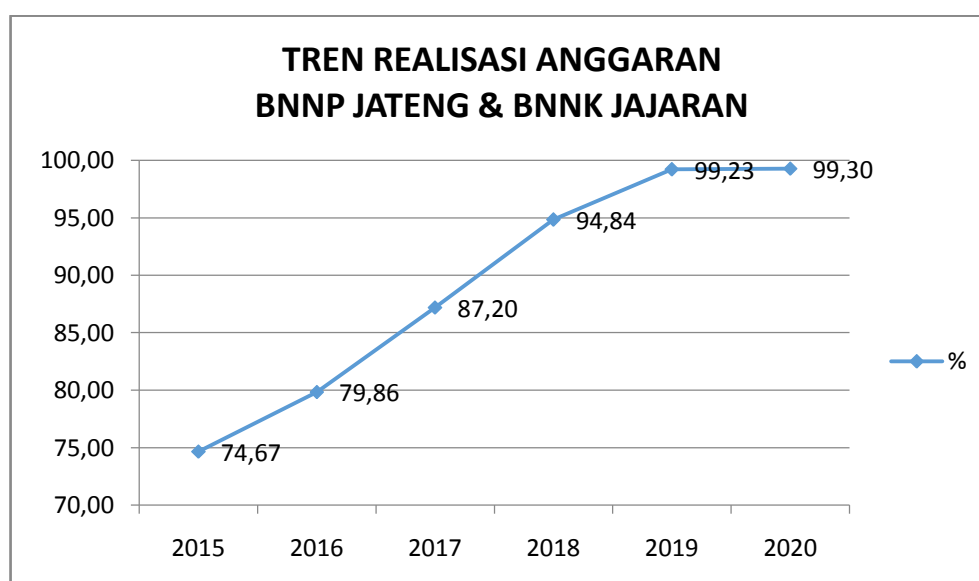
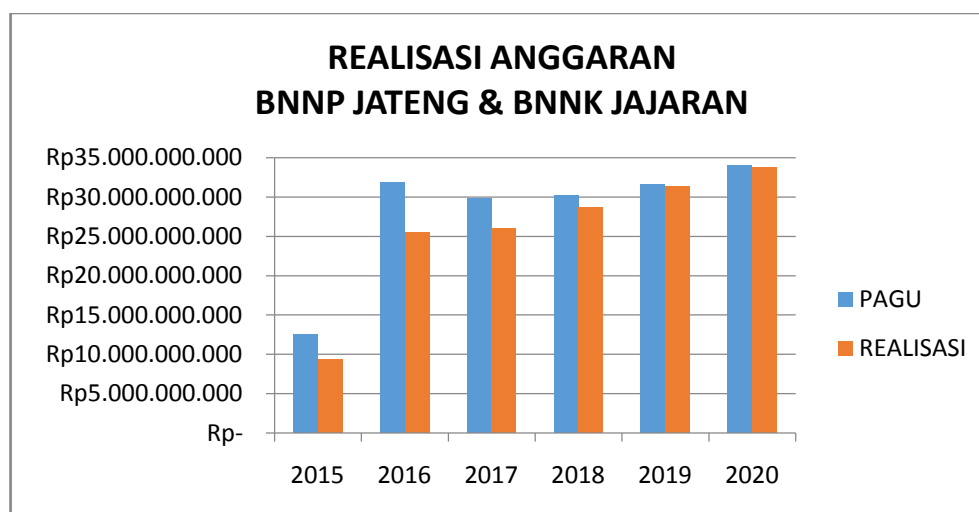
l) Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya.

Laporan Kinerja merupakan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan dan dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya dalam melaksanakan program kegiatan dengan menyajikan

tingkat pencapaian sasaran strategis BNN yang tertuang dalam perjanjian kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah. Kami menyajikan ringkasan laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah periode sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini:

**PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
BNNP JAWA TENGAH DAN BNN KABUPATEN/KOTA JAJARAN**

TAHUN	PAGU	REALISASI	%	SISA
2015	Rp 12.506.428.000	Rp 9.338.762.642	74,67	Rp 3.167.665.358
2016	Rp 31.933.874.000	Rp 25.500.844.590	79,86	Rp 6.433.029.410
2017	Rp 29.843.440.000	Rp 26.023.927.726	87,20	Rp 3.819.512.274
2018	Rp 30.192.814.000	Rp 28.636.132.286	94,84	Rp 1.556.681.714
2019	Rp 31.624.745.000	Rp 31.380.817.318	99,23	Rp 243.927.682
2020	Rp 34.057.527.000	Rp 33.817.608.994	99,30	Rp 239.918.006



Sumber: LAKIP BNNP Jawa Tengah

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Jawa Tengah yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Telah terbentuk regulasi berupa Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, dan Surat Keputusan Walikota sebagai komitmen bersama dalam penanganan P4GN di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan (Polda, Polresta, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan OPD terkait di Provinsi Jawa Tengah) terkait P4GN;
- c. Pesatnya fasilitas (Hotel, Sekolah, dan Kampus) di Kota Semarang khususnya sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah;
- d. SDM BNN Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan fungsional sehingga meningkatkan kinerja organisasi dalam melayani masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Satker Pusat untuk membiayai kegiatan dan program di daerah;
- b. Belum tersedianya gedung perkantoran yang memenuhi syarat, sehingga aktivitas pelaksanaan pekerjaan kurang nyaman;
- c. Satuan kerja terbentuk baru 9 (sembilan) BNNK dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga BNN Provinsi Jawa Tengah mengampu 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota;

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Jawa Tengah merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Jawa Tengah juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan.

Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. memperluas akses layanan publik dengan pemberian layanan P4GN di Mall pelayanan publik di Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan P4GN yang melibatkan BNN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai dengan pembagian zonasi wilayah meskipun tidak ada penambahan anggaran.
3. Melaksanakan setiap permohonan TAT dan penerbitan SKHPN sebagai bentuk layanan publik dan amanah Undang-undang meskipun target sudah terpenuhi.
4. Pelaksanaan koordinasi ke Walikota/ Bupati di wilayah Jawa Tengah dalam rangka program Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba).
5. Meningkatkan informasi dan layanan publik yang berkualitas.
6. Mengoptimalkan pemberantasan jaringan narkoba

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 akan disebar di 9 (sembilan) unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi (<i>nilai xxxx</i>)	N/A	3	3	4	5
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi (<i>nilai xxxx</i>)	N/A	9	9	9	9
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	N/A	9	9	9	9
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	N/A	1	1	1	1
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	N/A	3,16	3,16	3,16	3,16
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	N/A	60	60	60	60
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	10	10	10	10

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	N/A	4	4	4	4
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	N/A	12	12	12	12
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	N/A	3,2	3,2	3,2	3,2
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	3	2	2	2	2
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	25	19	19	19	19
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan	4	3	3	3	3

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pidana Narkotika	prekursor narkotika	prekursor narkotika yang P-21*)					
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	93	93	93	93
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	N/A	9	9	9	9
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	N/A	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	N/A	9	9	9	9

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	N/A	1.405.389.000	841.000.000	841.000.000	841.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	N/A	567.498.000	1.253.000.000	1.253.000.000	1.253.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	N/A	2.053.014.000	2.053.014.000	2.053.014.000	2.053.014.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	N/A	181.250.000	209.400.000	209.400.000	209.400.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	N/A	309.240.000	305.201.000	305.201.000	305.201.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	N/A	1.132.567.000	1.187.402.000	1.187.402.000	1.187.402.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP					
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	300.000.000	200.000.000	235.000.000	235.000.000	235.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1.884.216.000	1.211.916.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dimusnahkan*)					
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	326.760.000	555.110.000	594.885.000	594.885.000	594.885.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba					
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)	840.000.000	530.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
111.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	209.518.000	282.270.000	339.527.000	339.527.000	339.527.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target					
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	24.958.420.000	13.331.895.000	26.807.561.000	26.807.561.000	26.807.561.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target					

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

LAMPIRAN
MATRIK OUTPUT DAN RENCANA KOMPONEN/SUB KOMPONEN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat/ Koordinasi persiapan pengembangan softskill di SMP dan SMU sederajat/ Pelatihan softskill di SMP dan SMU sederajat
				Penyebarluasan Informasi dan Edukasi/ Informasi dan Edukasi melalui talkshow, kampanye, HANI, insert konten, media cetak, media luar ruang, branding sarana publik, TV, radio, media online, videotron.
				Monitoring Wilayah/ Monitoring Pelaksanaan Informasi dan Edukasi di BNNK
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	- - -
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba/ rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba/ intervensi pelaksanaan program
				- -
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pembinaan teknis ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				pembangunan desa/ pembinaan teknis ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa di jajaran BNNK/Kab
				Pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa/ koordinas dalam rangka fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa/ rakor dalam pelaksanaan fasilitasi advokasi/ fasilitasi pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba.
				Monitoring dan evaluasi ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa/ monev berbasis sumber daya pembangunan desa di jajaran BNNK
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan Teknis/ Rapat kerja teknis program pemberdayaan masyarakat/ rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pemetaan kelompok sasaran di Instansi Pemerintah/ Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba/ rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba
				Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di Instansi Pemerintah/ Bimbingan teknis penggiat P4GN instansi pemerintah/ Workshop penggiat P4GN Instansi Pemerintah/ pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine/ asistensi kota/kab tanggap ancaman narkoba/ sinkronisasi program dan kebijakan kab/kota tanggap ancaman narkoba
				Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di Instansi Pemerintah/ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat anti narkoba/ pembinaan teknis bagi BNN Kab/Kota bidang pemberdayaan alternatif
				Pemetaan kawasan rawan narkoba/ pemetaan potensi pada kawasan rawan narkoba/ Rapat kerja sinergi program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder/ audiensi dengan stakeholder.
				Pengembangan kapasitas pada kawasan rawan narkoba/ Bimbingan teknis

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				lifeskill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba/ Bimbingan teknis pendamping dalam rencana aksi
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat/ monev pada kawasan rawan perkotaan/pedesaan.
				-
				-
				-
				-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Pelatihan petugas intervensi berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan/ Bimbingan teknis petugas IBM
				Monitoring rencana aksi petugas rehabilitasi dan petugas AP/ monitorinf rencana aksi
				-
				-
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	-
				-
				-
				-
6.	Penguatan	1. Jumlah lembaga rehabilitasi	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi/ peningkatan kompetensi teknis
				Sertifikasi petugas rehabilitasi/ verifikasi tempat uji kompetensi/ uji sertifikasi konselor adiksi
				-
				-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP		rehabilitasi
				Koordinasi kelembagaan/ rapat koordinasi tingkat provinsi
				Monitoring fasilitas rehabilitasi/ monitoring dan evaluasi lembaga rehabilitasi
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Layanan IBM/ Penerimaan awal/ Layanan Wajib/ Layanan Pilihan/ Bina lanjut
				-
				-
				-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Pembentukan Unit IBM
				Supervisi dan Asistensi/ Evaluasi Unit IBM
				Operasional Unit IBM
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	-
				-
				-
				-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	Penyelidikan dan Penyidikan kasus tindak pidana narkoba/ penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba/ koordinasi kegiatan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika
				-
				-
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
				-
				-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Pengawasan dan pengelolaan barang bukti/ penerimaan barang bukti/ pengeluaran barang bukti
				-
				-
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika/ perawatan kesehatan pegawai/ pengawasan tahanan/ administrasi tahanan
				-
				-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang/ kegiatan penyelidikan dan pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang/ penyidikan tindak pidana/ pelaksanaan kegiatan pra tahap II/ menghadirkan saksi untuk persidangan
				-
				-
				-
				-
				-
11.	Penyusunan dan	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja**))

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target		Koordinasi Penyusunan RKA **)
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi **)
				Koordinasi Penyusunan Laporan **)
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan **)
				Monitoring dan Evaluasi **)
		2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan **)
				Operasional Perkantoran **)

Catatan:

**) Sub komponen yang bersifat generik